

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, Sahya. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anggraini, Jum, DR. Hj. S.H., M.H. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Budiardjo, Miriam. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gottschalk, Louis. (1986). *History: A Primer of Historical Method* terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Hadjon, Philipus M., dkk. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- HR, Ridwan. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- HR, Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ilmar, Aminuddin. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana.
- Indra, Mexsasai, dkk. (2021) *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Moeleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahayu, Amy Y.S., dkk. (2020) *Pelayanan Publik dan E-Government: Sebuah Teori dan Konsep*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Satori, Djam'an dan Aan Komarian. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Winarno, Nur Basuki. (2008). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Yamit, Zulian. (2005). *Manajemen Kualitas Produk dan Jasa*. Yogyakarta: Ekonsia.

Jurnal

- Adani, Ahmad Kafa, Tedy Murtejo, Nurul Cahyani. (2024). Studi Penentuan Tarif Buy The Service Trans Pakuan Koridor 1 dengan Metode Ability to Pay dan Willingness to Pay. *Journal Of Applied Civil Engineering and Infrastructure (JACEIT)*, Vol.5, No.1.
- Agus, Arawati, Sunita Barker dan Jay Kandampully. (2007). An Exploratory Study Service quality in the Malaysian Public Service Sector. *International Journal of Quality & Reliability Management*, Vol.24 No.2, hal. 177-190.
- Asmono, Ari & Hari Prasetyo. (2023). Kewenangan Pemerintah Surabaya Dalam Kerja Sama Sister City (Studi Kerja Sama Pemerintah Kota Surabaya dengan Kota Kitakyushu Jepang). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol,7, No.3. hal. 2569-2668.
- Fitria. (2018). Pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol.2, No.2. hal. 153-164.
- Puasa, R., dkk. (2018). Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol.1, No.1.
- Satoto, Sukanto & Bahder Johan Nasution. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Sains Sosio Huaniora*, Vol.3, No.1 hal. 67-75.
- Yuliardi, A.D. & Maharani Nurdin. (2023). Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik Guna Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Masyarakat. *Jurnal Hukum Sasana*, Vol.9, No.1. hal. 119-136.

Skripsi dan Disertasi

- Putra, R.A.H. (2019). *Peran Camat dala Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gajahmungkur*. (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2019).
- Sutarman. (2007). *Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Perizinan dan Penegkan Hukum Penangkapan Ikan di Laut*. (Disertasi, Universitas Airlangga, 2007).

Internet

Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. OPTIMALISASI BUY THE SERVICE (BTS) ANGKUTAN PERKOTAAN. (2022) Diakses pada tanggal 12 Desember, melalui: <https://baketrans.dephub.go.id/berita/optimalisasi-skema-buy-service-bts-angkutan-perkotaan#:~:text=Skema%20Buy%20The%20Service%20atau,yang%20memenuhi%20aspek%20kenyamanan%2C%20keamanan%2C>

Badan Pusat Statistik Kota Bogor. *Penduduk Kota Bogor Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2014-2021*.

Kompas.com, Biskita Trans Pakuan: Harga Tiket, Rute, dan Jam Operasional Layanan Teman Bus Bogor Terbaru. (2022) Diakses pada tanggal 12 Desember, melalui: <https://bandung.kompas.com/read/2022/07/16/060600178/biskita-trans-pakuan--harga-tiket-rute-dan-jam-operasional-layanan-teman-bus?page=all>

Kumparan, Bogor Jadi Kota Percontohan Program Buy The Service Kemenhub di Jabodetabek. (2021). Diakses pada tanggal 12 Desember, melalui: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/bogor-jadi-kota-percontohan-program-buy-the-service-kemenhub-di-jabodetabek-1vdiuZMyv9S/full>

Rejabar, Tarif Biskita Trans Pakuan Bogor Khusus Pelajar Mulai Berlaku. (2023) Diakses pada tanggal 19 Desember 2023, melalui: <https://rejabar.co.id/berita/s18ekk396/tarif-biskita-trans-pakuan-bogor-khusus-pelajar-mulai-berlaku>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, BTS Mau Hadir di tiap Kota di Indonesia. (2022). Diakses pada tanggal 19 Desember 2023, melalui: <https://setkab.go.id/bts-mau-hadir-di-tiap-kota-di-indonesia/>

Dokumen-dokumen

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan Kota Bogor.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten Kota.

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Atas Layanan Angkutan Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan (*Buy The Service*) Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) Atau 0% (Nol Persen)

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Kota Bogor.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.